

# PENGEMBANGAN PENATAAN KAWASAN PESISIR UTARA YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

*Medina Suci Handayani*

*Program Studi Teknik Arsitektur, FTSP, Institut Teknologi Budi Utomo, Jakarta*

*Medina.suci.handayani@gmail.com*

## Abstrak

Provinsi DKI Jakarta memiliki permasalahan kerusakan ekosistem Kawasan pesisir. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerusakan ekosistem kawasan pesisir di DKI Jakarta yaitu proses pendangkalan pesisir pantai yang salah satunya disebabkan air sungai masuk ke Kawasan pesisir mengandung konsentrasi tinggi sedimen padat tersuspensi. Selain itu, dengan kondisi sebagian besar ketinggian kawasan pesisir pantai Jakarta rata-rata sudah di bawah permukaan air laut, menjadikan kedalaman laut di Jakarta landai sehingga sangat dipengaruhi gelombang dan pasang surut air laut yang dapat mengakibatkan abrasi pantai (Kementerian Kelautan dan Perikanan, (FR, 2014). Pembangunan yang tidak merata di kawasan pesisir menyebabkan banyaknya ditemukan pemukiman kumuh. Karakteristik permukiman kumuh yang ada di pesisir Jakarta adalah memiliki kepadatan sedang sampai dengan tinggi antara 300-500 jiwa/ha, didominasi oleh jenis bangunan semi permanen, jaringan drainase yang buruk, rawan banjir dan memiliki sanitasi yang tidak sehat. Selain itu, permasalahan yang dihadapi oleh warga pesisir Jakarta adalah mengenai status kepemilikan lahan. Sebagian warga pesisir Jakarta mendirikan bangunan dan tinggal di atas tanah ilegal. Awal mulanya masyarakat secara masif mendirikan bangunan di pesisir Jakarta, kemudian pola tersebut membentuk pertumbuhan pemukiman sporadis.

Kata kunci : kawasan pesisir utara yang berkeadilan dan berkelanjutan

## 1. PENDAHULUAN

Secara umum permasalahan di Kawasan Pesisir Utara meliputi hal-hal sebagai berikut:

### ASPEK SOSIAL

Kurangnya pemahaman tentang *Community Environment* dalam sumber daya wilayah pesisir; *Humans Humanize* (Memanusiakan manusia); Kurangnya melibatkan masyarakat dalam program kota tanpa kumuh (*Community Based Development*); Kurangnya rasa memiliki kawasan/kota (*Sense of Belonging*); Masih adanya rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat; Tingkat penduduk yang tinggi dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta rendahnya pendidikan masyarakat sekitar; Ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

### ASPEK EKONOMI

Kurangnya eksplorasi potensi kawasan dengan pihak ketiga; Ketidaksesuaian Tata Guna Lahan; Memberdayakan masyarakat untuk memproduksi dan mengemas hasil sumber daya alam (tangkapan laut); Kurangnya fasilitas penunjang di daerah wisata mangrove Kali Adem; Tidak tertatanya kapal-kapal nelayan yang bersandar di dermaga.

### ASPEK LINGKUNGAN

Masyarakat yang kurang sehat (keselamatan, kenyamanan, dan keamanan); Pencemaran udara/polusi; Kenaikan permukaan laut; Perubahan iklim; Kurangnya penanganan resiko bencana alam (Banjir rob, penurunan muka tanah (*Land Subsidence*), Erosi, Sedimentasi, dan Intrusi air laut); Kurangnya pengolahan sampah laut/*marine debris* dengan menggunakan teknologi; Kurangnya Ruang terbuka hijau; Minimnya fasos dan fasum di daerah permukiman; Permukiman pesisir tidak layak huni dan penataan permukiman yang kurang terpadu; Rawan kebakaran;

- a. Kurangnya Transportasi Publik yang tidak ramah;
- b. Kerusakan ekosistem yang semaik parah;
- c. Tanggul pesisir (*seawall*) yang kurang tertata dan Kurangnya infrastruktur pelindung pantai (*groin dan/atau breakwater*); (Utara, 2023) (Utara, 2023)

## 2. METODOLOGI

### 3. 1. Intervensi fisik

Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, system tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (urban realm). Isu lingkungan (environmental sustainability) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

### 2. Rehabilitasi ekonomi

Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (local economic development), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota (P. Hall/U. Pfeiffer, 2001). Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru).

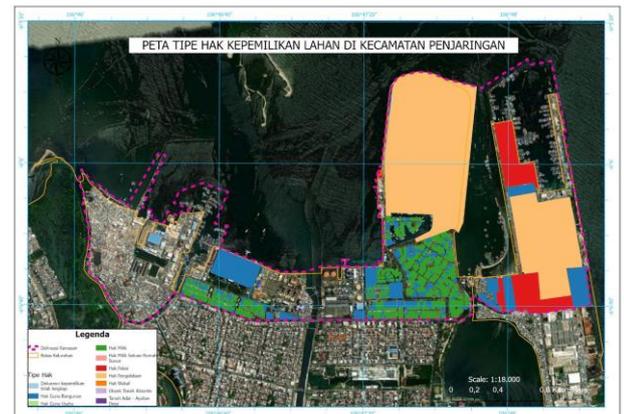
### 3. Revitalisasi sosial/institusional

Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (interesting), jadi bukan sekedar membuat beautiful place. Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (public realms). Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (place making) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh

suatu pengembangan institusi yang baik.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengembangkan suatu tatanan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup di Kawasan Pesisir Utara yang berkelanjutan sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir yang berkeadilan.



Gambar 1 : Delineasi Kawasan PesisirUtara yang akan dibenahi oleh Pemerintah

Sumber: Open Data DKI Jakarta, 2022

## 5. KESIMPULAN

Untuk mengatasi isu permasalahan besar di Kawasan Pesisir Utara Jakarta, maka diperlukan suatu konsep pengelolaan penataan Pesisir Jakarta yang terdiri dari 7 aspek utama (Sumber: <https://jakarta.go.id>, 24 Januari 2020).

**Interkoneksi akses** pengembangan jalur transportasi publik dan pribadi untuk menghubungkan jalur utama, sekunder, tersier yang dapat dicapai dengan mudah sehingga dapat membuka akses ke arah pesisir;

**Penambahan luas dan peningkatan kualitas pantai publik** yaitu memberi proporsi yang seimbang antara area publik dan peruntukan lain di pesisir Jakarta dengan adanya penambahan pantai publik;

**Pengelolaan persampahan dan sanitasi**, untuk menekan tingkat pencemaran lingkungan.

**Perbaikan ekosistem pesisir** (Kualitas air serta pemulihan keragaman biota) untuk

mendukung dan menjaga keseimbangan ekosistem di Pesisir Jakarta;

**Permukiman pesisir layak huni dan penataan permukiman** dengan pengelolaan yang mandiri melalui prinsip kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga. (Memperhatikan hal hal seperti kualitas ruang meningkat, sistem utilitas lebih efisien ditata, suplai air bersih tercukupi, air limbah dikelola dengan baik, ruang serapan air hujan meningkat;

**Penataan pelabuhan dan dermaga** yaitu terdapat alur pelayaran yaitu pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke dan Jalur Sirkulasi pelabuhan yakni pelabuhan yang melintasi tanggul;

**Penataan tanggul pesisir** dengan melakukan review dan penataan terkait fungsi dan desain tanggul yang sesuai dengan tujuan pengamanan pesisir dan tata air kota. Perencanaannya harus komprehensif dan terintegrasi dengan rencana drainase dari hulu-hilir.

## DAFTAR PUSTAKA

(Sumber: <https://jakarta.go.id>, 2020)  
(Jakarta, 2022)  
(FR, 2014)  
(Utara, 2023)